

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Berdasarkan sejarah yang terjadi selama Perang Dunia II pengeboman di Hiroshima dan Nagasaki yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Jepang merupakan penanda dari kekalahan Jepang pada Perang Dunia II. Pengeboman terhadap Hiroshima dan Nagasaki yang diperkirakan membunuh sebanyak 140.000 jiwa di Hiroshima dan 80.000 jiwa di Nagasaki sehingga pada akhir tahun 1945 memaksa Jepang untuk menyerah kepada sekutu. Kemudian, setelah enam hari dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang mengumumkan bahwa Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu dan menandatangani instrumen menyerah pada tanggal 2 September 1945, yang resmi mengakhiri Perang Pasifik dan Perang Dunia II. Kemudian Amerika Serikat sebagai negara yang menang dalam perang memperakarsai suatu pertemuan di San Francisco pada tahun 1951, untuk merundingkan perjanjian damai dan pampasan perang dengan Jepang.<sup>1</sup>

Jepang sebagai negara penjajah yang kalah dalam perang berkewajiban untuk membayar ganti rugi perang berdasarkan perjanjian San Francisco tersebut. Selanjutnya, Jepang mulai memberikan bantuan pembangunan sebagai

---

<sup>1</sup> Ganti Rugi Penjajahan. Diakses pada tanggal 14 Maret 2015. Pada pukul 18:17 WIB [http://historia.co.id/artikel/kuno/844/Majalah-Historia/Ganti\\_Rugi\\_Penjajahan](http://historia.co.id/artikel/kuno/844/Majalah-Historia/Ganti_Rugi_Penjajahan)

bentuk ganti rugi perang kepada 12 negara di Asia melalui perangkat *Official Development Assistance* atau sering dikenal dengan sebutan ODA.

Jepang yang mencoba bangkit dari kekalahan Perang Dunia II secara perlahan membangun perekonomiannya kembali. Pada awalnya Jepang menerima bantuan pemulihan pasca perang yaitu melalui GARIO ( Government and Relief in Occupied Areas ) dan EROA ( Economic Rehabilitation in Occupied Areas ). Pada periode 1946 - 1951, Jepang menerima \$ 2 miliar kredit dari dana EROA. Sedangkan pada 1953 -1966 Jepang menerima dana sebesar \$ 880.000.000 dari Bank Dunia untuk proyek-proyek besar, khususnya infrastruktur. Dari bantuan yang didapatkan oleh Jepang dari GARIO, EROA, maupun Bank Dunia dimanfaatkan oleh Jepang untuk menjalin kerjasama dengan beberapa negara. Seperti Burma, Laos, Indonesia, dan beberapa negara lainnya. Pemberian dana ini dimanfaatkan Jepang untuk menjalin kerjasama ekonomi luar negeri, sehingga Asia secara konsisten menjadi tujuan utama dari ODA pada 1990-an. Keuntungan yang Jepang dapatkan dari kerjasama ekonomi luar negeri yang dijalinnya, membuat Jepang dapat melunasi pinjamannya terhadap Bank Dunia.<sup>2</sup>

Bukti kebangkitan perekonomian Jepang pasca perang ditunjukkan melalui partisipasi Jepang dalam Colombo Plan untuk Koperasi Ekonomi dan Pembangunan Sosial di Asia dan Pasifik pada bulan Oktober 1954 berupa pemberian bantuan sebesar US\$ 100.000 membuktikan bahwa Jepang telah mampu bangkit dari keterpurukan akibat Perang Dunia II. Pemberian bantuan ini

---

<sup>2</sup> Inoguchi Takashi and Purnendra Jain ( 2000) *Japanese Foreign Policy Today*. A Reader. New York : PALGRAVE. Hal 153

diwujudkan Jepang melalui perangkat Official Development Assistance ( ODA ) yang dimana pada awalnya Jepang sebagai negara penerima bantuan pemulihan pasca perang kemudian menjadi negara pendonor bantuan pemulihan pasca perang. Kemudian pada tahun 1961, untuk mendapatkan dukungan kuat dan pengaruh yang lebih besar di dunia maupun di kawasannya, Jepang bergabung dengan DAC ( Development Assistance Committee ) yang dimana kemudian membuka jalan untuk Jepang bergabung menjadi anggota OECD (Organization for Economic Cooperation and Development). Sesuai dengan yang ditafsirkan oleh pemerintah Jepang bahwa melalui OECD akan mampu mendorong Jepang untuk memberikan bantuan luar negeri kepada negara-negara berkembang dan mendorong liberalisasi perdagangan sesuai dengan kode dan aturan OECD.

Kebangkitan Jepang yang cukup pesat terutama dalam bidang perekonomian dalam pemanfaatan *Official Development Assistance* dalam membantu negara – nagara yang bangkit pasca perang dunia dan keterlibatan Jepang yang cukup dominan dalam organisasi yang berbasis pembangunan ekonomi mengantarkan Jepang berhasil menjadi pedonor kedua terbesar di DAC OECD pada tahun 1976. Keberhasilan Jepang dalam pemanfaatan ODA ini semakin terlihat ketika Jepang sukses menjadi pendonor terbesar di dunia pada tahun 1989, dan meningkat pada puncaknya di 1995 dengan US\$ 14, 7 M.<sup>3</sup>

Pada dasarnya *Official Development Assistance* ( ODA ) muncul dari suatu bentuk bantuan yang ditujukan oleh Jepang kepada negara – negara jajahan dalam bentuk bantuan ganti rugi pasca perang. Namun karena perekonomian Jepang

---

<sup>3</sup> Ibid 155

berkembang pesat pasca perang kemudian ODA berkembang menjadi pemberian bantuan ekonomi yang diberikan kepada negara-negara yang akan berkembang untuk membantu pembangunan negara-negara berkembang tersebut sampai pada saat ini.

*Official Development Assistance* ( ODA ) terdiri dari dua bentuk yaitu bilateral ODA dan multilateral ODA. Bilateral ODA terdiri dari dua jenis yaitu Hibah Bilateral (Bantuan Hibah dan Kerjasama Teknis) dan Pinjaman (pinjaman dalam bentuk yen). Sedangkan multilateral ODA terdiri dari kontribusi untuk lembaga-lembaga PBB dan kontribusi pada bank-bank pembangunan multilateral. Hal tersebut disalurkan melalui lembaga seperti IMF dan Bank Dunia.

Padahal lebih dari lima dekade yang lalu, Jepang yang mulanya sebagai negara penerima yang kemudian hingga akhirnya Jepang menjadi negara pemberi dana bantuan ekonomi ke negara berkembang. Jumlah bantuan ekonomi Jepang saat itu pun mengalami kenaikan dari tahun ke tahun seiring dengan pemulihan dan pertumbuhan ekonomi Jepang yang membuat Jepang menjadi pendonor tertinggi di dunia pada tahun 1990-an.<sup>4</sup>

Di awal kemunculannya, ODA Jepang secara tidak langsung telah dirancang untuk dijadikan sebagai alat kebijakan luar negeri Jepang oleh pemerintah Jepang dengan berbagai alasan yang bisa berubah dari waktu ke waktu. ODA ini sendiri adalah suatu bentuk bantuan ekonomi kepada negara-negara berkembang dengan tingkat bunga yang lebih rendah dan periode

---

<sup>4</sup> Ibid 153

pembayaran yang lebih lama dibandingkan dengan pinjaman biasa. Berkaitan dengan masalah pengelolaan ODA Jepang di negara-negara pendonor lainnya, bantuan ekonomi biasanya direncanakan, dijalankan dan dikelola oleh satu badan khusus tertentu. Namun, Jepang tidak memiliki satu badan khusus untuk menangani ODA. Pembuatan keputusan yang terkait dengan ODA melibatkan 19 kementerian, dimana MOFA merupakan koordinator. Namun jika kementerian dan agensi yang lain tidak menyetujui, maka proposal proyek ODA tidak dapat diteruskan.

Pemanfaatan ODA Jepang sendiri difokuskan dalam empat bidang prioritas. Yaitu pengentasan kemiskinan, pertumbuhan pembangunan yang berkelanjutan, memperhatikan isu-isu global dan menciptakan perdamaian. Sasaran penerima ODA diprioritaskan bagi Negara-negara ASEAN termasuk Indonesia. Sesuai intruksi *Heart to Heart diplomacy* yang diluncurkan oleh PM Fukuda kepada ASEAN, yang dimana PM Fukuda menjanjikan 407.804 juta Yen untuk proyek ASEAN dan masing-masing negara anggotanya. Kemudian Indonesia menjadi penerima investasi langsung terbesar dari Jepang dibandingkan dengan negara negara anggota ASEAN lainnya. Yakni Indonesia menerima 24,8% antara tahun 1967 hingga 1990. Hal tersebut disebabkan oleh:

- a. Indonesia kaya akan sumber daya alam
- b. Indonesia mempunyai potensi pasar ekspor
- c. Lokasi Indonesia penting secara geopolitik

- d. Untuk merehabilitasi citra buruk Jepang pada Indonesia. Hal ini menyangkut pada masa penjajahan yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia selama 3,5 tahun.
- e. Agar pasokan SDA ke Jepang lancar
- f. Indonesia punya potensi untuk kegiatan perdagangan Jepang. Karena Jepang pernah mengalami defisit atau kekurangan anggaran belanja karena Jepang mengimpor begitu banyak barang dari Indonesia.<sup>5</sup>

Terkait dengan bantuan ODA terhadap pembangunan di Indonesia dimulai ketika Jepang memiliki tanggung jawab untuk pemulihan kondisi Indonesia pasca Perang Dunia II. Pemerintah Indonesia menandatangani perjanjian bilateral yang berisi kesepakatan ganti rugi. Antara lain pampasan perang senilai US\$223,080 juta serta kesediaan Jepang menanamkan modal di Indonesia dan mengusahakan pinjaman jangka panjang sampai batas US\$400 juta. Perjanjian Damai dan Pampasan Perang tersebut disahkan DPR RI pada tanggal 13 Maret 1958 dan diundangkan pada 27 Maret 1958.<sup>6</sup>

Pemberian bantuan ODA oleh Jepang pada Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya. Misalnya saja, pada saat krisis ekonomi melanda Asia sejak Agustus 1997, Jepang melalui ODA membantu Indonesia yang sedang berusaha keluar dari krisis dalam bentuk pinjaman khusus, perpanjangan kewajiban pembayaran, dukungan strategi pemerintah, dan lain – lain. Begitu juga

---

<sup>5</sup> ODA Jepang ke Indonesia. Diakses pada tanggal 14 Maret 2015. Pada pukul 17.48 WIB. <https://mandawibisono.wordpress.com/2011/12/05/oda-jepang-ke-indonesia/>

<sup>6</sup>Ganti Rugi Penjajahan. Diakses pada tanggal 14 maret 2015. Pada pukul 18:13 WIB [http://historia.co.id/artikel/kuno/844/Majalah-Historia/Ganti\\_Rugi\\_Penjajahan](http://historia.co.id/artikel/kuno/844/Majalah-Historia/Ganti_Rugi_Penjajahan)

pada saat gempa besar dan tsunami dari lautan Hindia melanda pulau Sumatra pada Desember 2004, Jepang melalui ODA menyediakan dana rekonstruksi dan rehabilitasi untuk korban bencana sebesar 640 USD.<sup>7</sup>Selain itu juga, progres dari bantuan ODA Jepang terhadap Indonesia tidak hanya meliputi sektor penanggulangan bencana atau pemberian bantuan pemulihan pasca perang terhadap Indonesia. Namun Jepang mulai mengenakan bantuan ODA untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesiayang meliputi beberapa sektor, yaitu sektor energi, sektor transportasi, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, sektor komunikasi dan informasi, sektor kesehatan dan kebersihan, dan yang terakhir adalah sektor governance.

Dari sektor energi, Jepang melalui ODA memberikan bantuan pematapan kemampuan distribusi listrik di Indonesia berupa peremajaan pembangkit listrik berskala besar yang dimana proyek tersebut akan meliputi kawasan Jawa Barat sampai Jawa Timur seperti, PLTA Gresik, PLTA Tanjung Priuk, PLTA Muara Tawar dan PLTA Muara Karang.Melalui ODA juga, Jepang memberikan kontribusi kepada Indonesia dari sektor transportasi dengan membenahi sistem transportasi dan jaringan distribusi barang yang ada di Indonesia khususnya kota Jakarta. Yang dimana, bantuannya berupa pembenahan sarana transportasi, seperti pembenahan jalan tol dan pembangunan jalan layang pada perempatan yang menjadi sumber kemacetan. Mulai dari proyek lama seperti jalan layang semanggi yang menjadi lambang kota Jakarta, jalan tol Merak, jalan tol Jagorawi

---

<sup>7</sup> Kemitraan Setengah Abad Bantuan ODA. Dikases pada tanggal 02 maret 2015. Pukul 19.10 WIB. [http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda\\_02.htm](http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_02.htm)

yang menuju ke Bogor, pembenahan jaringan kereta api Jabotabek, peninggian stasiun Gambir sebagai terminal kereta api jarak jauh dan banyak lagi proyek yang lain. dari sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, ODA Jepang mendistribusikan bantuannya dalam bentuk pembenahan sistem irigasi di Indonesia, yang dimana oleh ODA dilakukan melalui pinjaman Yen. Sampai dengan tahun 2007, telah dilaksanakan 49 proyek pembenahan irigasi dengan nilai bantuan sebesar 291,6 milyar Yen. Dari sektor kesehatan dan kebersihan, ODA memberikan bantuan berupa penjaminan kesehatan terhadap ibu dan anak di Indonesia.<sup>8</sup>

Sejak tahun 1989, ODA Jepang melalui JICA telah merealisasikan "Proyek Keluarga Berencana dan Kesehatan Ibu dan Anak" yang dimana proyek ini hanya berlaku sampai tahun 1994. Kemudian dari sektor komunikasi dan informasi, ODA Jepang mendistribusikan bantuannya kepada Indonesia berupa sumbangan terhadap integrasi dan demokratisasi. Kemudian, yang terakhir adalah dari sektor governance, ODA Jepang memberikan bantuan berupa pembenahan pemerintah dan masyarakat kota. Misalnya, penegakan hukum dan masyarakat kota di Indonesia diberikan sejak demokratisasi yang berlangsung sejak tahun 1998. Khususnya ketika otonomi daerah mulai dilaksanakan sejak Januari 2001, pendidikan SDM bagi pemda dan pembangunan daerah merupakan hal yang penting, kemudian ODA membuat program "Peningkatan kapasitas pemerintahan daerah" di Indonesia.

---

<sup>8</sup>Bantuan Pemantapan Kemampuan Distribusi Listrik di Indonesia. Diakses pada tanggal 31 Maret 2015. Pada pukul 21:17 WIB. [http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda\\_04a.htm](http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_04a.htm).

Jadi pemberian bantuan ODA oleh Jepang terhadap Indonesia tidak hanya sebatas pemberian bantuan ganti rugi pemulihan Indonesia pasca perang. Namun, berdasarkan pengaruh positif yang ditunjukkan oleh bantuan ODA Jepang terhadap pemerintah Indonesia, sehingga membuat keberadaan ODA sebagai pendonor bantuan kepada Indonesia mendapat respon baik dari pemerintah Indonesia. Kemudian respon baik dari pemerintah Indonesia ini dimanfaatkan oleh ODA untuk memperluas cakupan bantuan kepada Indonesia guna menopang pembangunan di Indonesia yang meliputi sektor energi, sektor transportasi, sektor pertanian, perkebunan dan perikanan, sektor informasi dan komunikasi, dan sektor yang lain – lain. Kemudian baru – baru ini, dari sektor transportasi dalam rangka mengatasi kemacetan lalu lintas Jakarta dan pembenahan distribusi barang. Jepang melalui ODA memberikan bantuan dalam bentuk pinjaman kepada Indonesia dalam pengembangan proyek MRT ( *Mass Rapid Transit* ) di Jakarta. Padahal, sebagaimana yang kita ketahui pada mulanya Jepang memberikan bantuan pada Indonesia hanya sebatas seperti pembenahan jalan raya, pembuatan jalan layang di Jakarta, dan pembenahan alat transportasi umum di kota besar seperti Jakarta. Namun, sekarang ini Jepang justru memberikan bantuan untuk pembangunan proyek MRT yang notabenehnya merupakan proyek besar pertama bagian pembangunan kereta di Indonesia.

Perlu kita ketahui bahwa MRT adalah singkatan dari *Mass Rapid Transit* yang secara harafiah berarti angkutan yang dapat mengangkut penumpang dalam jumlah besar secara cepat. Beberapa bentuk dari MRT bila dibedakan berdasarkan jenis fisik : BRT (*Bus Rapid Transit*), *Light Rail Transit* (LRT) yaitu kereta api rel

listrik, yang dioperasikan menggunakan kereta (gerbong) pendek seperti monorel dan Heavy Rail Transit yang memiliki kapasitas besar seperti kereta Jabodetabek yang ada saat ini. Berdasarkan Area Pelayanan : Metro yaitu heavy rail transit dalam kota dan Commuter Rail yang merupakan jenis MRT untuk mengangkut penumpang dari daerah pinggir kota ke dalam kota dan mengantarkannya kembali ke daerah penyangga (sub-urban). Jenis yang akan dibangun oleh PT. MRT Jakarta adalah MRT berbasis rel jenis Heavy Rail Transit.

Proyek MRT Jakarta ini adalah sebuah sistem bagian utama transportasi metro transit cepat di Jakarta yang *groundbreaking*. Proyek ini telah dimulai pada bulan Oktober tahun 2013 lalu, yang tujuannya untuk menanggulangi kemacetan di kota Jakarta di masa yang akan datang.<sup>9</sup>

Melalui JICA (*Japan International Cooperation Agency*) proyek MRT Jakarta akan mendapat pengawasan terhadap jalannya proyek tersebut. Pihak JICA mengalokasikan dan dalam bentuk pinjaman untuk penyediaan dana pembangunan. JICA memberikan bantuan untuk pembangunan MRT ini sebesar ¥125,237,000,000,-, sedangkan *loan agreement* yang telah diberikan sebesar ¥50,019,000,000,- terdiri dari *Loan Agreement* No. IP-536 sebesar ¥1,869,000,000,- dan *Loan Agreement* No. IP-554 sebesar ¥48,150,000,000,-.

Pelaksanaan Pembangunan MRT ini akan melibatkan beberapa instansi, baik pada tingkatan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT.

---

<sup>9</sup> Tentang PT. MRT Jakarta. Diakses pada tanggal 2 Maret 2015. Pada Pukul 18 : 57 WIB.  
<http://www.jakartamrt.com/informasi-mrt/tentang-mrt/>

MRT Jakarta. Oleh karena itu, Dokumen Anggaran yang diperlukan juga melibatkan lembaga-lembaga tersebut dengan nama program dan kegiatan berbeda namun dengan satu *output* yang sama, yaitu pembangunan MRT.

Dana pinjaman JICA yang telah diterima Pemerintah diterushibahkan kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dokumen anggaran (APBN) yang berkaitan dengannya berada pada Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktorat Pembiayaan dan Kapasitas Daerah, Sub Direktorat Hibah Daerah, nama program dan kegiatannya adalah Program Pengelolaan Hibah Negara dengan Kegiatan Penerusan Pinjaman atau Hibah LN sebagai hibah kepada Pemerintah Daerah. *Executing Agency* adalah Direktorat Jenderal Perkeretaapian.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai *implementing agency*, akan mencatat sebagai penerimaan dan pengeluaran dalam APBD, menempatkan dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan pembangunan MRT pada Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta dengan nama Program dan Kegiatan Penyertaan Modal (Pembiayaan/Investasi) Pemerintah DKI Jakarta kepada PT. MRT Jakarta. Selain itu, dokumen pelaksanaan anggaran pembangunan MRT Jakarta juga ditempatkan pada BAPPEDA DKI Jakarta sebagai belanja langsung dengan nama program, Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kota, dengan nama kegiatan, *Management Consulting Services for MRT Jakarta*. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai *implementing*

agency, telah menunjuk PT. MRT Jakarta sebagai *sub implementing* dari program pembangunan MRT Jakarta<sup>10</sup>

## **B. Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka untuk memudahkan pemecahan masalah dan sebagai pedoman dalam pembahasan lebih lanjut, dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut:

”apa kepentingan Jepang terkait dengan pemberian bantuan ODA untuk pembangunan proyek MRT Jakarta ?

## **C. Landasan Teori**

Teori adalah bentuk penjelasan paling umum yang memberitahukan mengapa sesuatu bisa terjadi dan kapan sesuatu bisa diduga akan terjadi. Penggunaan teori selain untuk melakukan eksplanasi juga menjadi dasar bagi prediksi ( hipotesa ). Selain itu juga digunakan konsep untuk mengorganisasi dan mengidentifikasi fenomena yang menarik perhatian. Teori menggabungkan serangkaian konsep menjadi satu penjelasan yang menunjukkan bagaimana konsep – konsep ini secara logis saling berhubungan.

---

<sup>10</sup> Pendanaan Proyek MRT Jakarta. Diakses pada tanggal 2 Maret 2015. Pada Pukul 19 : 22 WIB. <http://www.jakartamrt.com/informasi-mrt/pendanaan-proyek/>

Untuk mempermudah analisa penelitian mengenai pokok permasalahan yang ada, maka penulis akan menggunakan teori ketergantungan dan konsep bantuan luar negeri.

#### **a. Konsep Bantuan Luar Negeri**

Dalam sistem global, bantuan luar negeri merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan karena adanya pola kekuatan yang terstruktur. Bantuan luar negeri serupa dengan diplomasi, propaganda, maupun aksimiliter yang ditujukan oleh suatu negara terhadap negara lain. Seperti yang diungkapkan oleh Weisman bahwa bantuan luar negeri adalah komponen diplomasi dan dapat dikatakan sebagai alat pengontrol yang efektif, setidaknya untuk mempengaruhi tindakan negara lain.

K.J holsti, dalam bukunya *International Politics: Framework of Analysis*, mengartikan bantuan luar negeri sebagai transfer uang, teknologi, ataupun nasehat-nasihat teknis dari Negara donor ke Negara penerima. Dalam konteks hubungan Jepang dengan Indonesia terkait dengan bantuan ODA terhadap pengembangan proyek MRT Jakarta. Menurut K.J holsti bahwa : program – program bantuan memberi manfaat secara serentak kepada negara pendonor bantuan ( Jepang ) dan negara penerima bantuan ( Indonesia ) : negara penerima bantuan berupa uang, pinjaman, bahan, dan pengetahuan dan berdasarkan bantuan tersebut negara penerima bantuan berharap bahwa dimasa yang akan datang akan mampu menciptakan perekonomian modern, stabilitas politik, ataupun keamanan militer. Sedangkan negara pendonor bantuan tanpa memandang tipe “syarat-syarat” yang mereka lekatkan pada bantuan mereka,

biasanya berharap akan menerima dividen politik atau komersial dengan segera atau dalam jangka panjang.<sup>11</sup>

Selain itu juga K.J Holsti memaparkan tipe-tipe bantuan luar negeri diantaranya : *pertama*, bantuan militer. *Kedua*, bantuan teknis. *Ketiga*, program hibah atau pemberian dan impor komoditi, dan yang *keempat* yaitu pinjaman untuk pembangunan.<sup>12</sup> Dalam konteks hubungan Jepang dengan Indonesia tipe bantuan luar negeri yang diberikan Jepang kepada Indonesia dari keempat tipe tersebut hanya berlaku 3 tipe saja yaitu : bantuan teknis, program hibah, dan pinjaman untuk pembangunan. Adapun tujuan politis dari bantuan luar negeri yaitu sebagai instrumen untuk mempengaruhi sikap dari negara – negara penerima bantuan

#### **b. Teori Ketergantungan ( Dependensia )**

Pada dasarnya teori ketergantungan atau dependensia telah berkembang di Amerika Latin sejak awal 1950-an. Teori ini muncul dengan tujuan untuk membuat studi hubungan internasional relevan dengan situasi global pada saat ini. Teori ketergantungan ini merupakan sebuah teori yang menggambarkan suatu hubungan antara negara maju ( pusat ) dengan negara miskin ( pinggiran ). Dimana kedua negara saling membutuhkan satu sama lain untuk mencapai tujuan nasional dari masing – masing negara yang bersangkutan. Theotonio Dos Santos, memaparkan *hubungan ketergantungan* antara negara maju dengan negara berkembang merupakan suatu kondisi dimana ekonomi suatu negara diintervensi

---

<sup>11</sup>K.J Holsti ( 1988 ) *Politik Internasional* edisi ke-4. Jakarta : Erlangga. Hal 245

<sup>12</sup>Ibid. Hal 248

dan diekspansi oleh kehadiran negara lain.<sup>13</sup> dimana bentuk ketergantungan yang terjadi antara negara maju dengan negara berkembang yaitu negara maju melakukan ekspansi ekonomi kepada negara berkembang sehingga memposisikan negara berkembang hanya dapat menyaksikan jalannya ekspansi tersebut dan hanya pasrah menerima pengaruh yang positive maupun yang negative dari ekspansi tersebut. Menurut Dos Santos ada 3 bentuk ketergantungan yang terjadi antara Negara maju dengan Negara berkembang, yaitu :

1. *Ketergantungan kolonial* yaitu adanya keterikatan antara negara maju dengan negara berkembang berdasarkan sejarah seperti penjajahan dan sebagainya. Ketergantungan kolonial disini lebih mengacu pada track record penjajahan antara negara pusat atau negara maju ke negara pinggiran atau negara berkembang. Artinya, dari pihak negara penjajah mengalami ketergantungan terhadap negara yang dijajah. Sebagai contoh yang umum terjadi pada suatu penjajahan adalah, kebutuhan barang yang dibutuhkan oleh negara penjajah terhadap negara yang dijajah. Atau juga terjadi suatu kegiatan ekspor barang yang dibutuhkan oleh negara penjajah ke negara yang dijajah. Dan juga hubungan antara penjajah dengan penduduk negara yang dijajah lebih bersifat eksploitatif.
2. *Ketergantungan Finansial-Industrial* yaitu kekuatan finansial yang dimiliki oleh negara pinggiran yang merdeka masih dikuasai oleh

---

<sup>13</sup>Theotonio Dos Santos, review . vol. 60, 231

negara pusat. Bahkan tidak jarang negara pusat menanam modal dalam nominal yang sangat besar terhadap negara pinggiran. Hal tersebut dapat terjadi melalui kerjasama dengan pengusaha lokal negara pinggiran.

3. *Ketergantungan Teknologis-Industrial* yaitu bentuk ketergantungan ini dapat dikatakan sebagai bentuk ketergantungan yang baru. Kegiatan ekonomi yang terjadi di negara pinggiran tidak lagi berupa ekspor barang mentah yang dibutuhkan oleh negara pusat. Tetapi lebih kepada penanaman modal oleh perusahaan multinasional ke negara pinggiran. Hal tersebut dilakukan untuk kepentingan negara pinggiran.

Pada dasarnya, teori ketergantungan ini menyepakati bahwa sebab dari ketergantungan antara negara pusat dengan negara pinggiran adalah kekurangan modal dan kurangnya tenaga ahli yang dimiliki oleh negara pinggiran. Tetapi faktor penyebabnya adalah proses imperialisme dan neo imperialisme yang mendapat surplus modal yang terjadi di negara pinggiran ke negara pusat. Akibatnya, surplus utama yang seharusnya didapatkan oleh negara pinggiran untuk membangun negerinya justru tersedot oleh negara utama atau negara pusat tersebut. Maka pada akhirnya yang terjadi dalam proses ini adalah sebuah pembangunan dan keterbelakangan. Kedua aspek tersebut merupakan dua hal yang bertolak belakang. Hal tersebut merupakan dua aspek dari sebuah proses global yang sama. Proses global ini merupakan sebuah kapitalisme dunia. Di kawasan yang satu, proses tersebut melahirkan sebuah pembangunan, namun berbeda di kawasan yang lain yang menyebabkan lahirnya suatu keterbelakangan.

Keterbelakangan yang terjadi di negara pinggiran ini telah secara intensif mendapat bantuan dari negara-negara pusat.<sup>14</sup>

Sementara dalam konteks hubungan antara Jepang dan Indonesia, hubungan ketergantungan dari kedua negara dapat dikatakan bahwa Jepang berperan sebagai negara pusat sedangkan Indonesia berperan sebagai negara pinggiran. Jepang dengan perkembangan ekonominya yang cukup pesat menjadi negara terbesar kedua sebagai penyalur program bantuan luar negeri kepada negara-negara berkembang melalui *Official Development Assistance* (ODA). Sedangkan Indonesia, sejak kemerdekaannya pada tahun 1945 dengan keadaan ekonomi dan politik yang kurang stabil menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang menjadi tujuan negara-negara pendonor seperti Jepang dan yang lainnya atau dengan kata lain Indonesia menjadi negara penerima bantuan. Dikatakan demikian bahwa Indonesia ketergantungan terhadap bantuan pembangunan dari Jepang semisalnya saja paska Indonesia merdeka pada tahun 1945, Jepang sudah mendonorkan bantuan melalui *Official Development Assistance* (ODA).

Pertama, pada tahun 1997 Jepang melalui ODA membantu Indonesia yang sedang berusaha keluar dari krisis dalam bentuk pinjaman khusus, perpanjangan kewajiban pembayaran, dukungan strategi pemerintah, dan lain – lain dan ketika Indonesia mengalami gempa besar dan Tsunami di Sumatera pada tahun 2004, Jepang melalui ODA menyediakan dana rekonstruksi dan rehabilitasi untuk korban

---

<sup>14</sup> The Structure of Dependence by Theotenio Dos Santos. Hal 231

bencana sebesar 640 USD. Banyak juga bantuan yang lain dari Jepang yang meliputi pembangunan Indonesia dari segi transportasi, komunikasi, pertanian, kehutanan dan sebagainya.<sup>15</sup>

Padahal pada awalnya ketergantungan hubungan antara Jepang dengan Indonesia hanya sebatas pasokan ekspor barang mentah Indonesia terhadap Jepang. Begitu juga sebaliknya dengan Indonesia yang hanya membutuhkan dana pembangunan ekonomi pasca kolonialisme. Namun, seiring perkembangan globalisasi dan penggunaan teknologi yang semakin maju menyebabkan hubungan ketergantungan dari kedua negara bergeser kepada kebutuhan Indonesia terhadap teknologi Jepang. Sehingga Jepang memanfaatkan kondisi tersebut dengan investasi – investasi proyek besar kepada Indonesia yang dimana perealisasi proyek tersebut akan membutuhkan teknologi yang ditransfer Jepang ke Indonesia.

#### **D. Hipotesa**

Jawaban sementara yang dapat ditarik untuk menjawab pertanyaan pada pokok permasalahan pemberian bantuan ODA yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia pada proyek MRT Jakarta ini sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Kemitraan setengah abad bantuan ODA Jepang di Indonesia ( sejarah bantuan ODA Jepang di Indonesia ) diakses pada tanggal 3 maret 2015 pada pukul 19:53 WIB. [http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda\\_02.htm](http://www.id.emb-japan.go.jp/oda/id/whatisoda_02.htm).

“Jepang memberikan bantuan ODA kepada pemerintah Indonesia untuk pembangunan proyek Mass Rapid Transit ( MRT ) di Jakarta, karena Jepang ingin menciptakan ketergantungan yang lebih besar dari pemerintah Indonesia terhadap teknologi transportasi Jepang.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Penulisan skripsi ini didasarkan pada analisa data sekunder, yaitu teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan, dengan menggunakan literatur seperti buku, majalah, ebook, koran, dan penerbitan berkala lainnya sebagai sumber data.

### **F. Jangkauan Penelitian**

Untuk menjelaskan kepentingan Jepang terkait bantuan ODA terhadap proyek MRT ini, penulis memberikan batasan waktu penelitian yaitu dimulai perealisasiian proyek MRT pada tahap pertama. Hal tersebut berlangsung pada tahun 2013 – 2018. Tahun 2013 merupakan dimana proyek *Mass Rapid Transit* ( MRT ) Jakarta mulai dijalankan. Sedangkan pada tahun 2018 merupakan target penyelesaian proyek MRT ini. Ini dimaksudkan agar pembahasan tidak keluar dari topik dan tidak terlalu luas. Walaupun begitu data-data seputar perkembangan proyek MRT Jakarta ini tetap menjadi sumber data penelitian untuk melengkapi data primer yang ada.

## **G. Sistematika Penulisan**

Sebagai sebuah penulisan deskriptif, penulis membuat sub – sub pokok yang dapat menguraikan permasalahan untuk dapat menjawab pokok permasalahan diatas.

Bab I : Latar belakang masalah, pokok permasalahan, landasan teori, hipotesa, teknik pengumpulan data, jangkauan penelitian, sistematika penulisan.

Bab II : Membahas mengenai sejarah perkembangan Jepang pasca Perang Dunia II dan perkembangan ODA Jepang pasca perang.

Bab III: Membahas mengenai sejarah pemberian bantuan ODA di Indonesia, progres pemberian bantuan ODA di Indonesia, dan pemberian bantuan ODA untuk pembangunan proyek *Mass Rapid Transit* ( MRT ).

Bab IV: Membahas mengenai ketergantungan Indonesia terhadap teknologi transportasi Jepang terkait dengan proyek *Mass Rapid Transit* ( MRT ).

Bab V : Berisi tentang kesimpulan dari skripsi yang berupa rangkuman dari BAB I – BAB IV dan sub bab yang sudah dijelaskan terperinci. Sekaligus menjadi bagian akhir dari skripsi ini.